

Mekanisme Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar (SD) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Nur Haniyah Kholidiyah¹, Rohmatun Nazilah², Faiqotul Hikmah², Fatimatu Zahro⁴

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹ Haniyanur29@gmail.com, ² mazilahh27@gmail.com, ³ faiqotulhikmah911@gmail.com, & ⁴ FatimatuZahro95@uinikas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan mekanisme pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa pada tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menerima alokasi anggaran sebesar 32,55% dari total APBD yang diproyeksikan mencapai Rp4,6 triliun. Pengawasan dana BOS dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu pengawasan internal oleh Dinas Pendidikan yang mencakup verifikasi laporan keuangan, monitoring langsung, serta pendampingan; audit oleh Inspektorat Daerah dan lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP untuk mencegah penyalahgunaan dana; serta pengawasan partisipatif oleh komite sekolah dan masyarakat guna memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Selain itu, instrumen dan sistem pengawasan digital juga diterapkan melalui sistem pelaporan daring dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, pengawasan dana BOS masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan SDM pengawas, kesulitan kepala sekolah dalam memahami regulasi, serta potensi manipulasi laporan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kapasitas tim pengawas, optimalisasi teknologi digital dalam pelaporan, serta penguatan peran komite sekolah dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Kata Kunci: Pengawasan, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Dasar, Kabupaten Jember.

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Jember, tetap menjadi tantangan besar yang kompleks dan multidimensional (Siswanto.A. dkk, 2024). Pendidikan dasar menjadi aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan menghentaskan kemiskinan. Sebagai penunjang dan pendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai sumber pendanaan utama bagi sekolah-sekolah di Indonesia, termasuk di tingkat Sekolah Dasar (SD). Dana BOS memiliki tujuan untuk membantu dalam hal operasional sekolah, meningkatkan akses pendidikan, dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi peserta didik (Susanti, E.dkk, 2024).

Di Kota Jember, pengelolaan dan penggunaan dana BOS berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti transparansi penggunaan dana, efektivitas alokasi anggaran, serta potensi penyalahgunaan dana (Pamungkas.T.S.dkk, 2024). Mekanisme pengawasan yang kurang optimal dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penggunaan dana BOS, sehingga tujuan utama dari dana tersebut tidak dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai mekanisme pengawasan dana BOS untuk Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Jember menjadi sangat penting. Dengan memahami bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, serta kendala yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat Sekolah Dasar (SD) memiliki peran krusial dalam menjamin kelancaran proses pendidikan (jemberkab.go.id, 2023). Namun, di Kabupaten Jember, terdapat permasalahan terkait pengawasan penggunaan dana BOS. Misalnya, pada tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan selisih signifikan antara laporan penggunaan dana BOS dengan bukti pertanggungjawabannya, yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut (Bupati Jember Peringatan Penggunaan Dana BOS Jangan Mengulang Jadi Temuan BPK, 2019).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan dalam pengelolaan dana BOS. Salah satu langkah yang telah diambil adalah mengadakan sosialisasi mengenai pengelolaan dana BOS sesuai dengan regulasi terbaru. Pada Februari 2023, sebanyak 3.567 kepala sekolah di Kabupaten Jember mengikuti sosialisasi terkait Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BOS sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencegah kesalahan dalam pengelolaan dana tersebut (jemberkab.go.id, 2023).

Penelitian terkait pengelolaan dan pengawasan dana BOS telah banyak dilakukan dalam lima tahun terakhir. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Luthfia.R.A.dkk, 2023) menganalisis pengelolaan dana BOS terhadap kualitas sarana dan

prasarana di sekolah dasar, dan menemukan bahwa pengelolaan yang baik berdampak positif pada kualitas sarana dan prasarana. Selain itu, (Maharani & Kurniawan, 2023) meneliti implementasi kebijakan dana BOS di Kabupaten Jember dan menemukan bahwa efisiensi dan efektivitas penggunaan dana masih menjadi masalah yang menghambat pencapaian tujuan BOS. Penelitian lain oleh (Susiani. K.dkk, 2022) menyoroti pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dasar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. (Winaya.dkk, 2022) menganalisis prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS reguler dalam program Merdeka Belajar, sementara (Sari. E. P.dkk 2021) mengevaluasi pengelolaan dana BOS pada SDN 060864.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan (gap) dalam mekanisme pengawasan dana BOS, terutama terkait implementasi kebijakan dan efektivitas pengawasan di tingkat daerah. Pembahasan pada penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai perencanaan pengawasan, pengawasan yang dilakukan, serta bagaimana evaluasi dari pengawasan yang sudah dilakukan (A. Makhfud.dkk, 2024). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penyaluran anggaran bagi setiap sekolah di berbagai daerah khususnya Kabupaten Jember. Pendidikan yang berhasil tidak akan pernah tercapai tanpa peran aktif dari pemerintah. Peran yang dimaksud ialah berupa penyaluran sumber dana untuk pembiayaan kebutuhan pendidikan. Kegiatan ini mencoba mengungkapkan lebih dalam terkait bagaimana implementasi pengelolaan Dana BOS serta pendistribusiannya yang sangat dibutuhkan masyarakat yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (Fauzan & N. Setianingrum, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan dana BOS untuk sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dengan harapan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan saat ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan guna memastikan penggunaan dana BOS yang efektif dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang yang perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007: 4). Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data baca, simak, dan catat melalui sumber-sumber yang digunakan seperti buku maupun jurnal. Lalu analisis data yang digunakan ialah dengan mendeskripsikan data yang didapat dalam dan menyesuaikan dengan materi pengawasan Dana BOS di SD kota Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Pendidikan Kabupaten Jember (Dispendik Jember) adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor pendidikan di Kabupaten Jember. Tugas utama Dispendik Jember meliputi peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta implementasi kurikulum yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat (Pamungkas.T.S.dkk. 2024). Pada tahun 2025, Dispendik Jember menerima alokasi anggaran sebesar 32,55% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, yang diproyeksikan mencapai Rp4,6 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk gaji pegawai, mengingat jumlah pegawai di lingkungan Dispendik Jember mencapai sekitar 14 ribu orang.

Persiapan dalam Pengawasan Dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Mekanisme pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) memerlukan persiapan yang matang agar berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan dana BOS harus memastikan bahwa semua tahapan telah dipersiapkan dengan baik. Berikut beberapa langkah persiapan yang dilakukan:

1. Menyusun Regulasi dan Pedoman Pengawasan
Dinas Pendidikan Kabupaten Jember harus memastikan bahwa regulasi yang mengatur penggunaan dan pengawasan dana BOS telah tersosialisasi dengan baik kepada seluruh sekolah. Regulasi ini mengacu pada:
 - a. Permendikbud tentang Dana BOS yang berlaku pada tahun berjalan.
 - b. Petunjuk Teknis (Juknis) BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. (Susanti, E.dkk. 2024).
 - c. Kebijakan internal Dinas Pendidikan terkait pengelolaan dan pelaporan dana BOS. (Susanti, E.dkk. 2024).
2. Membentuk Tim Pengawas BOS
Membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah. Tim ini terdiri dari:
 - a. Pengawas sekolah
 - b. Tim verifikator BOS
 - c. Auditor internal daerah
 - d. Perwakilan dari Inspektorat Daerah jika diperlukan. (Susanti, E.dkk. 2024).Tim ini bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS di setiap sekolah dasar.
3. Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Dinas Pendidikan perlu memiliki sistem yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap penggunaan dana BOS. Beberapa langkah yang dapat dilakukan:
 - a. Penerapan aplikasi atau sistem digital untuk pelaporan penggunaan dana BOS secara online.
 - b. Pembuatan mekanisme laporan berkala yang wajib disampaikan oleh sekolah.

- c. Evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan sekolah terhadap regulasi.
4. Pelatihan dan Pembekalan bagi Pengawas dan Sekolah
Agar pengawasan berjalan efektif, perlu dilakukan pelatihan bagi:
 - a. Pengawas sekolah, agar memahami aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS.
 - b. Kepala sekolah dan bendahara BOS, agar memahami tata cara penggunaan dana yang sesuai dengan regulasi dan menghindari penyalahgunaan anggaran.Pelatihan ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta audit dana BOS.
5. Penyediaan Mekanisme Pengaduan dan Tindak Lanjut
Untuk meningkatkan transparansi, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember harus menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat atau pihak sekolah terkait dugaan penyalahgunaan dana BOS. Pengaduan ini bisa melalui:
 - a. Hotline pengaduan BOS
 - b. Laporan langsung ke Dinas Pendidikan
 - c. Audit investigatif jika ditemukan indikasi penyimpangan
6. Koordinasi dengan Pihak Terkait
Pengawasan dana BOS tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti:
 - a. Inspektorat Daerah
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 - c. Pemerintah daerah dan Komite SekolahKoordinasi ini penting untuk memastikan pengawasan lebih optimal dan akuntabel. (Susanti, E.dkk. 2024).

Mekanisme Pengawasan Dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Mekanisme pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Pratiwi, A.dkk. 2022). Tujuan pengawasan dana BOS adalah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memiliki peran utama dalam mengawasi pengelolaan dana BOS di setiap sekolah dasar agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penggunaannya (A. Makhfud.dkk. (2024).

Berikut adalah beberapa aspek pengawasan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember:

a. Mekanisme Pengawasan Dana BOS

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember secara rutin mengadakan sosialisasi terkait peraturan terbaru mengenai pengelolaan dana BOS. Tujuan dari sosialisasi ini adalah memastikan bahwa pengelolaan dana BOS sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pengawas SD memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pendidikan. Tujuannya adalah agar dana BOS digunakan sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi dalam rapor pendidikan (Susanti, E.dkk. 2024). Melalui mekanisme tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berupaya memastikan bahwa dana BOS dikelola dengan transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Berikut mekanisme yang dilakukan secara lebih jelas dan terperinci.

1. Pengawasan Internal oleh Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melakukan pengawasan dengan beberapa tahapan, yaitu verifikasi dan validasi laporan keuangan, monitoring langsung ke sekolah, serta pendampingan dan sosialisasi. Sekolah diwajibkan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disesuaikan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, sementara laporan penggunaan dana BOS diperiksa secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Tim pengawas dari Dinas Pendidikan juga melakukan kunjungan langsung ke sekolah guna mengevaluasi realisasi penggunaan dana BOS, di mana sekolah harus menunjukkan bukti pengeluaran yang sesuai dengan rencana anggaran. Selain itu, Dinas Pendidikan memberikan pendampingan kepada sekolah dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencegah kesalahan administrasi.
 2. Audit oleh Inspektorat dan Lembaga Pengawas Keuangan
Inspektorat Daerah Kabupaten Jember secara berkala melakukan audit dana BOS untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 3. Pengawasan oleh Komite Sekolah dan Masyarakat
Komite sekolah memiliki peran dalam mengawasi penggunaan dana BOS agar sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan dana BOS melalui mekanisme pengaduan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan (Haba, R. dkk., 2021).
- b. Instrumen dan Sistem Pengawasan
Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menggunakan berbagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, di antaranya sistem pelaporan digital, di mana sekolah diwajibkan melaporkan penggunaan dana BOS secara daring melalui sistem yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, setiap sekolah harus menyusun laporan keuangan dengan format standar yang telah ditentukan untuk memudahkan pemeriksaan dan analisis data. Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana BOS juga dilakukan setiap triwulan agar dapat segera diperbaiki jika terdapat kekeliruan (Kurniawan, A. dkk., 2023).
- c. Kendala dalam Pengawasan Dana BOS

Pengawasan dana BOS di Kabupaten Jember menghadapi beberapa kendala utama. Salah satunya adalah keterbatasan SDM pengawas di Dinas Pendidikan yang tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang harus diawasi, sehingga pengawasan menjadi kurang optimal. Selain itu, masih terdapat kepala sekolah atau bendahara BOS yang mengalami kesulitan dalam memahami regulasi, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan dan pelaporan dana. Kendala lainnya adalah potensi penyalahgunaan dan manipulasi laporan, di mana beberapa sekolah mungkin tidak sepenuhnya transparan dalam penggunaan dana BOS, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

d. **Solusi dan Upaya Peningkatan Pengawasan**

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana BOS, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dapat melakukan beberapa langkah strategis, seperti meningkatkan kapasitas tim pengawas melalui pelatihan dan penambahan jumlah pengawas agar lebih banyak sekolah yang dapat dipantau secara efektif, serta mengoptimalkan teknologi digital dalam sistem pelaporan guna meningkatkan transparansi dan kemudahan pengawasan. Selain itu, peran komite sekolah dan masyarakat perlu diperkuat agar pengawasan dapat dilakukan secara partisipatif, sementara kerja sama dengan aparat penegak hukum juga harus dijalin apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dana, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku (Kurniawan, A. dkk., 2023)

Evaluasi Pengawasan Dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Evaluasi pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) bertujuan untuk menilai efektivitas mekanisme pengawasan yang telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti kepatuhan sekolah terhadap regulasi, efektivitas penggunaan dana, transparansi, serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan.

a. **Aspek yang Dievaluasi dalam Pengawasan Dana BOS**

1. **Kepatuhan Sekolah terhadap Regulasi**

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sekolah dasar di Kabupaten Jember mematuhi Petunjuk Teknis (Juknis) BOS dari pemerintah pusat dan daerah, prosedur pelaporan keuangan dan administrasi BOS, serta ketepatan waktu dalam menyusun dan menyerahkan laporan BOS. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah mengikuti aturan yang ditetapkan, namun masih ditemukan beberapa kasus keterlambatan dalam pelaporan serta kesalahan administrasi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman bendahara sekolah.

2. **Efektivitas Penggunaan Dana BOS**

Dana BOS seharusnya digunakan sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Evaluasi penggunaan dana mencakup beberapa aspek, seperti kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan utama sekolah, termasuk pembelian buku, alat tulis, dan biaya operasional lainnya, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas pendidikan. Selain itu, evaluasi juga menilai apakah sekolah mengalami kekurangan atau kelebihan dana yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah menggunakan dana BOS dengan benar, tetapi masih terdapat beberapa sekolah yang kurang optimal dalam perencanaan anggaran, sehingga tidak semua dana digunakan secara efektif.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dalam penggunaan dana BOS dievaluasi melalui keterlibatan komite sekolah dan masyarakat dalam pengawasan, ketersediaan laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak terkait, serta pelaporan secara digital untuk meningkatkan akuntabilitas. Meskipun terdapat perbaikan dalam transparansi, masih ditemukan beberapa sekolah yang kurang terbuka dalam menyampaikan laporan penggunaan dana BOS kepada komite sekolah atau orang tua siswa.

4. **Efektivitas Pengawasan oleh Dinas Pendidikan**

Evaluasi terhadap pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mencakup sejauh mana monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin, ketersediaan tim pengawas yang memadai, serta keberadaan sistem pengaduan dan tindak lanjut jika terjadi penyalahgunaan. Dinas Pendidikan telah melakukan pengawasan melalui inspeksi langsung dan audit berkala, namun jumlah pengawas yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus diawasi, sehingga efektivitas pengawasan masih menjadi tantangan (E.A. Kaligisi dkk., 2021).

b. **Kendala dalam Pengawasan Dana BOS**

Dari hasil evaluasi, beberapa kendala yang dihadapi dalam pengawasan dana BOS meliputi:

1. **Keterbatasan SDM Pengawas**

Jumlah pengawas di Dinas Pendidikan masih kurang dibandingkan dengan banyaknya SD yang harus diawasi, sehingga pengawasan belum optimal di semua sekolah.

2. **Kurangnya Pemahaman Administrasi di Sekolah**

Beberapa kepala sekolah dan bendahara BOS masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan dan menggunakan sistem digital yang diterapkan oleh pemerintah.

3. **Kurangnya Transparansi di Beberapa Sekolah**

Masih ada sekolah yang belum melibatkan komite sekolah atau masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan dana BOS.

4. **Potensi Penyalahgunaan Dana**

Beberapa kasus menunjukkan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, meskipun dalam jumlah kecil.

5. **Rekomendasi untuk Peningkatan Pengawasan**

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana BOS di Kabupaten Jember meliputi peningkatan kapasitas dan jumlah pengawas agar lebih banyak sekolah yang dapat dipantau secara optimal, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan bendahara BOS dalam mengelola dan bertanggungjawabkan

dana dengan lebih baik. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan guna memastikan pengawasan yang lebih akuntabel, didukung dengan optimalisasi sistem digital agar proses pengawasan lebih efisien dan mudah diakses. Mekanisme pengaduan dan penindakan juga harus diperkuat untuk memastikan adanya tindak lanjut yang tegas terhadap setiap indikasi penyalahgunaan dana BOS (Abekh, Y. A. dkk., 2025).

KESIMPULAN

Persiapan dalam pengawasan dana BOS untuk SD di Kabupaten Jember harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Dinas Pendidikan harus memastikan regulasi yang jelas, pembentukan tim pengawas yang kompeten, pelatihan bagi pihak terkait, serta sistem monitoring yang efektif. Dengan persiapan yang baik, diharapkan penggunaan dana BOS dapat lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi sekolah serta peserta didik. Pengawasan dana BOS di Sekolah Dasar Kabupaten Jember dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pengawasan internal oleh Dinas Pendidikan, audit oleh Inspektorat dan lembaga pengawas keuangan, serta pengawasan partisipatif oleh komite sekolah dan masyarakat. Meskipun masih terdapat kendala dalam pengawasan, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan benar dan transparan demi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember. Evaluasi pengawasan dana BOS di Sekolah Dasar Kabupaten Jember menunjukkan bahwa meskipun sudah ada sistem pengawasan yang berjalan, masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, seperti keterbatasan pengawas, kurangnya transparansi di beberapa sekolah, serta kurangnya pemahaman kepala sekolah dan bendahara BOS dalam administrasi keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM pengawas, optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaporan, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana BOS. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan penggunaan dana BOS di Kabupaten Jember dapat lebih optimal, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dengan judul “Mekanisme Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam proses penelitian ini, khususnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang telah memberikan akses data dan informasi yang diperlukan, serta kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah dasar yang menjadi bagian dari penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga, rekan-rekan, dan semua pihak yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala bentuk dukungan dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda, serta penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan transparansi dan efektivitas pengawasan dana BOS di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Makhfud.dkk. (2024). Efektifitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10(120).
- Abekh, Y. A.dkk.(2025). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Negeri. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 5(1).
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. (2023, Februari). *Ribuan Kepala Sekolah di Jember Ikuti Sosialisasi Pengelolaan BOS*. Pemerintah Kabupaten Jember. <https://www.jemberkab.go.id/ribuan-kepala-sekolah-di-jember-ikuti-sosialisasi-sosialisasi-pengelolaan-bos/>
- E.A.Kaligisi.dkk. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. 12 (2).
- Fauzan & N. Setianingrum. (2023). Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kab. Jember. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. 9(1).
- Haba.R.dkk. (2021). Ombudsman as an Institution Of Public Service Supervision in Makassar City. *NVEO*. 8(4).
- Kumparan News. (2023, Februari 14). *Bupati Jember peringatkan penggunaan dana BOS jangan mengulang jadi temuan BPK*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/bupati-jember-peringatkan-penggunaan-dana-bos-jangan-mengulang-jadi-temuan-bpk-1ztP&2HL9>
- Kurniawan.A.dkk. (2023). Audit Kinerja Kebijakan Publik, Pengawasan Publik yang Menembus Ruang dan Waktu untuk Mendorong Peningkatan Kinerja Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan World Class Government. Penerbit Andi.
- Luthfia, R. A., Amelia, D. P., Oktafianti, M., Galand, P. B. J., & Annisa, R. N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana BOS terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29486-29490.
- Maharani, I. S., & Kurniawan, A. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22(2), 168-186.
- Moleong, L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya.

- Pamungkas,T.S.dkk. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Oleh BPKAD Kab.Jember. *CP.Administration Review*. 2(1).
- Pratiwi,A.dkk. (2022). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*. 2(1).
- Sari, P., Masyitah, E., & Sari, E. P. (2021). Analisis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 060864. *Accumulated Journal*, 3(1), 84-90.
- Siswanto.A. dkk. (2024). Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 di Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Jember. *Journal of Indonesian Social Society*. 2(1).
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, E.dkk. (2024). Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Inspektorat Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*. 16(1). 18-27.
- Susiani, K., Arnyana, I. B. P., & Suastra, W. (2022). Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia: Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 173-182.
- Winaya, I. M. A., Wijaya, P. E. P., Sudiarta, I. N., & Sutika, I. M. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dalam Program Merdeka Belajar. *Widya Accarya*, 13(2), 133-144.